

DAMPAK NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ISRAEL DAN NEGARA-NEGARA ARAB TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI TIMUR TENGAH

Fadhlan Nur Hakiem¹, Lolita Deby Mahendra Putri², Nurbani Adine
Gustianti³

¹²³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

¹fadhlan.nur@fisip.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak normalisasi hubungan diplomatic Israel dan negara-negara Arab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah. Penandatanganan Abraham Accords pada tahun 2020 menjadi babak baru hubungan Israel dan negara-negara Arab. Empat negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini tentu berdampak terhadap dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina berpotensi terdampak akibat normalisasi hubungan diplomatik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak terpengaruh oleh normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Arab dan Israel. Indonesia konsisten untuk memperjuangkan perdamaian dan nasib bangsa Palestina sesuai dengan parameter internasional yaitu resolusi PBB dan Arab Peace Initiative.

Kata kunci: hubungan diplomatik, Arab, Israel, Indonesia, kebijakan luar negeri

PENDAHULUAN

Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh empat negara Arab sejak penandatanganan perjanjian Abraham (*Abraham Accords*) pada tahun 2020 memicu perubahan pada konstelasi politik di kawasan Timur Tengah. Normalisasi tersebut merujuk pada hubungan resmi yang dibangun oleh Israel dan negara-negara Arab. Israel dan negara-negara Arab memulai hubungan yang berjalan secara resmi dan mengakui kedaulatan masing-masing negara. Normalisasi hubungan diplomatik tersebut menjadi perkembangan yang penting dalam dinamika hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Hal ini terjadi karena normalisasi

hubungan tersebut menjadi tanda perubahan sikap negara-negara Arab terhadap Israel.

Hubungan negara-negara Arab dan Israel adalah hubungan yang dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian. Pada era modern saat ini, tercatat bahwa konflik Arab-Israel telah terjadi sejak tahun 1948 (*Causes and consequences*, 2021). Negara-negara Arab menolak pendirian negara Israel yang berujung pada konflik bersenjata antara kedua kelompok negara tersebut. Sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, tercatat telah terjadi beberapa perang besar antara Israel dengan negara-negara Arab, seperti Perang Enam Hari tahun 1967, dan Perang Yom Kippur 1973 (*Causes and consequences*, 2021). Dalam perang-perang tersebut, Israel seringkali memenangkan perang tersebut dan berhasil memperluas wilayahnya.

Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan negara-negara Arab mendorong dilakukannya upaya-upaya perdamaian. Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian tersebut adalah dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Pada tahun 1978, melalui perjanjian Camp David, Mesir menjadi negara Arab pertama yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, sekaligus mengakui eksistensi negara Israel. Langkah Mesir tersebut mendapatkan kritik dari negara-negara Arab. Namun demikian, pada tahun 1994, Yordania mengikuti Langkah Mesir untuk menjadi perjanjian damai sekaligus melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.

Tiga puluh tahun kemudian, tindakan normalisasi hubungan diplomatik, kembali dilakukan oleh negara-negara Arab. Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab (UAE) menandatangani *Abraham Accords* yang menjadi tanda normalisasi hubungan diplomatik antara UAE dan Israel. Normalisasi hubungan yang dilakukan oleh UAE kemudian diikuti oleh negara-negara Arab lainnya yaitu Bahrain, Sudan, dan Maroko ("The Abraham Accords," 2020).

Tindakan normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Arab telah memicu kontroversi di kawasan Timur Tengah. Beberapa pihak menentang tindakan tersebut karena dinilai dapat melemahkan para pejuang kemerdekaan Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel. Di sisi lain, normalisasi hubungan diplomatik Arab-Israel menunjukkan sikap terbuka negara-negara Arab terhadap Israel.

Peristiwa normalisasi akan berdampak serius bagi kawasan Timur Tengah. Dalam situasi tersebut, perlu untuk melihat dampak normalisasi tersebut bagi Indonesia. Meskipun Indonesia tidak berada di kawasan Timur Tengah, tetapi Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Dengan latar belakang tersebut, maka tidak heran jika Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap dinamika hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Indonesia adalah negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Oleh karena itu, Indonesia akan sangat berkepentingan dengan berbagai perubahan atau dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk melakukan Analisa tentang bagaimana dampak normalisasi hubungan diplomatik Israel dan negara-negara Arab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Kerangka Pemikiran

Kebijakan Luar Negeri

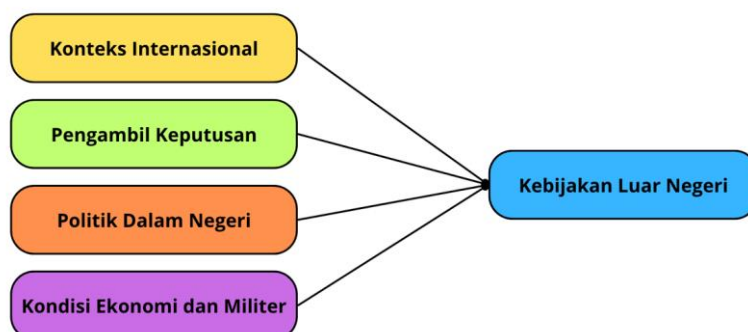
Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) adalah satu diskursus yang elementer dalam studi hubungan internasional. Chris Brown dan Kirsten Ainley mendefinisikan *foreign policy* sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia eksternal (Brown & Ainley, 2005). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat terlihat bahwa kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah hal yang esensial bagi negara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah elemen-elemen mendasar yang menjadi pedoman para pembuat kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain. Elemen-elemen tersebut

adalah kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1969).

Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional sebagai elemen esensial dalam kebijakan luar negeri dapat mengalami perubahan. Menurut William D. Coplin, terdapat empat hal yang menentukan perubahan tersebut ialah konteks internasional, pengambilan keputusan, politik dalam negeri, dan kondisi ekonomi dan militer (Coplin, 2003). *Pertama*, konteks internasional yang disebutkan oleh Coplin menyangkut beberapa hal yaitu faktor geografis, ekonomi, dan politik (Coplin, 2003). Faktor geografi menjadi variabel penting karena berkaitan dengan logistik militer, pola perdagangan, pola aliansi, kenggotaan organisasi internasional. Sedangkan faktor ekonomi menimbulkan dukungan serta tuntutan kepada para pengambil kebijakan luar negeri. Kemudian, hubungan politik seperti aliansi dan perasaan kepentingan bersama merupakan bagian yang esensial dalam konteks internasional suatu negara (Coplin, 2003).

Kedua, perilaku pengambil keputusan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan individu menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. *Ketiga*, kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat memengaruhi hubungan yang dibangun oleh suatu negara terhadap negara lain. *Keempat*, politik dalam negeri. Situasi politik dalam negeri akan memengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara (Coplin, 2003; Wuryandari, 2018).

Gambar 1. Determinan Kebijakan Luar Negeri



Sumber: Coplin, 2003

Berdasarkan kerangka pemikiran Coplin tersebut maka kebijakan luar negeri suatu negara akan selalu dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal negara tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada kebijakan luar negeri Indonesia. Setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia adalah hasil dari dinamika internal dan eksternal tersebut.

Kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dapat dipengaruhi oleh konteks internasional. Dalam kasus ini adalah konteks internasional yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab dengan Israel dapat memiliki dampak terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hubungan politik seperti perasaan kepentingan bersama sangat penting dalam konteks internasional (Coplin, 2003). Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara Arab / Islam menyangkut soal konflik Israel – Palestina. Indonesia juga mendorong perdamaian di kawasan tersebut. Tindakan normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab tersebut berpotensi mengganggu kepentingan bersama tentang nasib Palestina dan perdamaian di kawasan. Dengan demikian, maka normalisasi tersebut memiliki potensi memberikan dampak bagi kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan tersebut. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Metode ini digunakan bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi. Dalam penelitian ini fenomena tersebut

adalah dampak normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder seperti jurnal, *working paper*, tesis, dan dokumen lainnya yang teruji validitasnya.

Penelitian ini menggunakan konten analisis sebagai teknik Analisa data. Analisa data digunakan dalam suatu penelitian untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian, termasuk untuk melakukan uji hipotesa. Menurut Moleong, Analisa data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasi (Moleong, 2014). Konten analisis sebagai alat Analisa data digunakan dengan melakukan penyajian data yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis antara fakta dan teori yang digunakan. Analisa tersebut bertujuan untuk melihat implikasi normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kerangka yang telah diuraikan sebelumnya, pada bagian ini akan dijelaskan dengan lebih detail mengenai normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Israel dan negara-negara Arab serta dampaknya bagi Indonesia. Pada bagian pertama akan diuraikan tentang normalisasi hubungan diplomatik. Bagian kedua menguraikan dampak normalisasi tersebut terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dan Negara-Negara Arab

Normalisasi hubungan diplomatik adalah proses yang dilakukan dengan sangat panjang. Normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Arab dan Israel tidak dilakukan secara tiba-tiba. Konflik Arab-Israel memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada era modern, konflik Arab-Israel, dimulai sejak kedatangan bangsa Israel ke wilayah Palestina dan

mendeklarasikan negara Israel pada tahun 1948. Negara-negara Arab menolak pendirian tersebut dan menimbulkan konflik bersenjata antara kedua kelompok negara tersebut. Konflik bersenjata Arab-Israel dimulai sejak tahun 1948 dan terus menerus terjadi hingga sekarang. Konflik tersebut juga tercatat melahirkan perang dengan skala yang relatif besar seperti Perang tahun 1948, perang Enam Hari tahun 1967, dan perang Yom Kippur pada tahun 1973. Dalam peperangan tersebut, Israel seringkali keluar menjadi pemenang dan berhasil melakukan perluasan wilayah. Pada tahun 1948 Israel berhasil mengokupasi Sebagian wilayah Mandatori Palestina, dan Tepi Barat (Shlaim, 1987; Wardoyo & Valentino, 2022). Hal yang sama juga terjadi pada perang tahun 1967, dan perang Yom Kippur, dimana Israel selalu berhasil memperluas wilayahnya pasca peperangan tersebut. Atas dasar hal tersebut maka negara-negara Arab memutuskan untuk tidak melakukan hubungan diplomatic dengan Israel yang disepakati dalam Arab Summit di Khartoum pada tahun 1967 (Wardoyo & Valentino, 2022).

Perang Yom Kippur tahun 1973 menjadi awal munculnya kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Mesir. Mesir menjadi negara Arab pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pada perang tersebut, Mesir dan Suriah menyerang Israel. Namun, pada akhir perang tersebut Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir dan Suriah, dan bahkan memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Sinai dari Mesir dan dataran tinggi Golan dari Suriah (Wardoyo & Dyaududin, 2023). Kekalahan tersebut pada akhirnya menyebabkan Presiden Mesir, Anwar Sadat memilih untuk melakukan perjanjian damai dengan Israel. Amerika Serikat melakukan mediasi untuk mensukseskan perjanjian damai tersebut, hingga lahirlah perjanjian Camp David yang menjadi tanda disepakatinya normalisasi hubungan diplomatik antara Mesir dan Israel.

Pada tahun 1994, Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Normalisasi yang dilakukan oleh Yordania dilatarbelakangi terjadinya perang Teluk pada

tahun 1990. Pada perang tersebut, Yordania tidak termasuk kedalam kelompok anti-Saddam Hussein yang mengakibatkan Yordania dikucilkan dan mengalami kesulitan ekonomi (Wardoyo & Diyauddin, 2023). Normalisasi hubungan diplomatik Yordania dan Israel juga tidak dapat dilepaskan dari peran Amerika Serikat. Pasca perang Teluk, Amerika Serikat secara aktif mendorong negara dialog antara Isarel dan negara-negara Arab termasuk Yordania. Amerika Serikat menyediakan bantuan ekonomi dan persenjataan untuk mendorong Yordania agar bersedia melakukan perjanjian damai dengan Isreal (Wardoyo & Diyauddin, 2023). Dorongan Amerika Serikat tersebut berperan relatif signifikan dalam mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik antara Yordania dan Israel. Perjanjian Wadi Araba menjadi tanda dimulainya babak baru, dimana Yordania sepakt untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada tahun 2020, negara-negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel kembali bertambah. Tercatat empat negara Aran melakukan normalisasi tersebut. Negara-negara tersebut adalah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan. Keempat negara tersebut memutuskan untuk melakukan normalisasi melalui perjanjian Abraham (*Abraham Accords*) atas mediasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Normalisasi hubungan yang dilakukan oleh UEA disinyalir dipicu oleh faktor keamanan. UEA menilai bahwa Iran sebagai ancaman utama karena rencana pengembangan nuklir Iran (Wardoyo & Valentino, 2022). Selain itu, masalah radikalisme sedang meningkat dikawasan, beberapa kelompok Islamis seperti Hamas, Ikhwanul Muslimin, kelompok Houthi, dan juga Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menjadi ancaman yang tidak dapat dinafikan oleh UEA. Didorong dengan situasi tersebut, menjadi pilihan UEA dan ketiga lainnya untk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Masing-masing pernjanjian, yaitu Camp David, Wadi Araba, dan perjanjian Abraham bukanlah peristiwa perjanjian yang muncul dengan tiba-tiba dan seketika. Perjanjian-perjanjian tersebut lahir dari rangkaian

peristiwa yang panjang dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan perjanjian tersebut, peran Amerika Serikat sebagai mediator sangat esensial dan tidak dapat dinafikan. Amerika Serikat sebagai pihak ketiga memiliki peran yang signifikan dalam memuluskan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab.

Normalisasi hubungan diplomatik tersebut membawa implikasi bagi negara-negara Arab yang melakukan kesepakatan. Secara umum, dampak yang diperoleh oleh negara-negara Arab dari kesepakatan tersebut adalah keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi tersebut tidak selalu diperoleh secara langsung dari Israel, tetapi dapat juga diperoleh dari Amerika Serikat.

Pasca perjanjian Camp David, sejak tahun 1978 sampai dengan 2020, Mesir mendapatkan bantuan ekonomi senilai 50.2 milyar USD dari Amerika Serikat (Wardoyo & Diyauddin, 2023). Kemudian, Yordania yang melakukan kerjasama ekonomi seperti melakukan pembelian gas alam dari Israel pada tahun 2014 dan kerjasama seputar Laut Mati pada tahun 2015 (Wardoyo & Diyauddin, 2023). Pada kasus UAE, normalisasi mendorong kerjasama kedua negara semakin intens baik pada kerjasama ekonomi atau juga kerjasama keamanan. Pada kerjasama ekonomi, kedua negara sepakat untuk melakukan sinergi pada sektor finansial, investasi, dan energi. Kedua negara menyepakati perjanjian kerjasama. Free Trade Agreement pada tahun 2022 (Wardoyo & Diyauddin, 2023).

Meskipun negara-negara Arab tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi dan keamanan sebagai hasil normalisasi tersebut. Namun respon negatif juga didapatkan oleh negara-negara tersebut. Respon negatif tersebut khususnya berkaitan dengan pembelaan negara-negara tersebut pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam kasus UAE misalnya, keputusan normalisasi UAE mendapat kritik dari otoritas Palestina dan dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa Palestina. Otoritas Palestina bahkan dengan tegas memutuskan untuk menolak bantuan penanganan Covid-19 dari UAE (Wardoyo & Valentino, 2022). Normalisasi

hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina.

Dampak Normalisasi terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah

Kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah yang paling esensial berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia menjadi negara yang konsisten untuk memperjuangkan nasib bangsa Palestina. Menurut Wardoyo, terdapat beberapa faktor yang membuat Indonesia mendukung Palestina. Faktor tersebut ialah solidaritas muslim, perjuangan kemerdekaan, dan resolusi PBB (Wardoyo & Diyauddin, 2023). Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Konflik Arab-Israel adalah konflik yang penting bagi umat Islam dan dukungan terhadap Palestina adalah bagian dari solidaritas muslim tersebut. Selanjutnya, pengalaman sejarah Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah membuat Indonesia memiliki kepentingan dan perasaan yang sama dengan negara-negara terjajah lainnya. Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Semangat ini tertuang dengan jelas dalam pembukaan konstitusi Indonesia. Atas dasar semangat tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang sependapat dengan solusi yang dirumuskan oleh resolusi PBB, dimana resolusi tersebut mendukung penyelesaian konflik Arab-Israel dengan solusi dua negara. Faktor-faktor tersebut menjadi landasan yang kuat bagi Indonesia untuk mendukung dan menyuarakan perdamaian dan nasib bangsa Palestina.

Sikap dan tindakan Indonesia di Timur Tengah khususnya menyangkut masalah konflik Israel-Palestina berpotensi mendapatkan tantangan dari tindakan normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Arab dengan Israel. Normalisasi hubungan diplomatik yang telah dilakukan oleh empat negara Arab yaitu UAE, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada tahun 2020 berpotensi memiliki dampak terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hal ini tentu akan berdampak bagi Indonesia sebagai negara yang menegaskan Palestina sebagai kepentingan pokok dalam kebijakan luar negerinya (Wardoyo & Diyauddin, 2023).

Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab dengan Israel tidak mendapatkan respon berarti dari Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Indonesia memahami intensi UAE dan Bahrain yang menyediakan ruang bagi para pihak terkait untuk bernegosiasi dan mengubah pendekatan untuk menyelesaikan isu Palestina melalui kesepakatan tersebut (*Normalisasi Hubungan UEA-Bahrain*, 2020). Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab tersebut tidak merubah posisi Indonesia tentang Palestina. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB dan parameter yang disepakati secara internasional termasuk solusi dua negara (*Normalisasi Hubungan UEA-Bahrain*, 2020). Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa inisiatif yang dilakukan untuk perdamaian Palestina tidak boleh menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui *Arab Peace Initiatives* dan Resolusi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (*Kemesraan Israel-UEA-Bahrain*, 2020).

Sikap Indonesia terkait dengan konflik Palestina-Israel juga tetap konsisten. Pada tahun 2022, Indonesia menginisiasi pertemuan OKI untuk mendukung Palestina (Wardoyo & Diyauddin, 2023). Indonesia juga batal menjadi tuan rumah Sepakbola Piala Dunia U-20 (*FIFA Removes Indonesia*, 2023). Pembatalan tersebut dipicu oleh munculnya gelombang penolakan atas kehadiran Tim nasional Israel sebagai salah satu peserta dalam pagelaran tersebut. Meskipun menuai sikap pro dan kontra, penolakan terhadap Timnas Israel tersebut membuktikan sikap politik Indonesia atas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kemudian, pada *High-Level Open Debate* Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan pada Oktober 2023, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan, atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang

(*Indonesia Desak Dewan Keamanan*, 2023). Dalam konflik Hamas-Israel, Indonesia mendesak Dewan Keamanan untuk segera: 1) melakukan seruan bersama untuk segera melakukan gencatan senjata; 2) memprioritaskan akses kemanusiaan; 3) kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan (*Indonesia Desak Dewan Keamanan*, 2023). Meskipun demikian, menjadi salah satu catatan adalah bahwa Indonesia memiliki hubungan dengan Israel secara diam-diam. Hubungan ini tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga menyangkut bidang intelijen (Wardoyo & Diyaudhin, 2023).

Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab relatif tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Sikap dan tindakan yang diambil pemerintah Indonesia terkait dengan masalah konflik Palestina-Israel menunjukkan konsistensi terhadap kasus tersebut. Namun demikian, normalisasi tersebut dapat memengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat Indonesia. Mayoritas Indonesia mendukung sikap pemerintah untuk mendukung Palestina dan bersikap anti terhadap Israel. Namun terdapat kelompok di masyarakat Indonesia yang cenderung lebih menganjurkan dialog dan mendorong upaya dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina tersebut. Kelompok-kelompok ini mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Normalisasi tersebut dapat memengaruhi opini publik untuk mendorong Indonesia untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

KESIMPULAN

Normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Arab dan Israel telah memengaruhi konstelasi politik di Timur Tengah. Normalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara Arab tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia tidak mau berkomentar lebih jauh tentang keputusan negara-negara Arab tersebut. Indonesia memahami keputusan negara-negara tersebut, dan tetap memilih untuk selalu konsisten memperjuangkan perdamaian bangsa Palestina

sesuai dengan parameter yang disepakati yaitu resolusi PBB dan *Arab Peace Initiative*. Sikap dan tindakan Indonesia tersebut menggambarkan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah, khususnya tentang konflik Israel-Palestina sebagai kebijakan luar negeri utama Indonesia di Timur Tengah. Kebijakan tersebut juga menggambarkan dengan jelas bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak terdampak normalisasi hubungan diplomatik secara signifikan. Indonesia tetap konsisten memperjuangkan bangsa Palestina. Meskipun demikian, peristiwa normalisasi hubungan diplomatik tersebut dapat memengaruhi opini publik masyarakat Indonesia. Peristiwa normalisasi tersebut dapat meningkatkan opini masyarakat Indonesia untuk mendukung normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, C., & Ainley, K. (2005). *Understanding International Relations* (3 ed.). Palgrave Macmillan.
- Causes and consequences of the Arab-Israeli wars | Britannica. (2021, April 29). <https://www.britannica.com/summary/Arab-Israeli-wars#>
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (M. Marbun, Penerj.; 2 ed.). Sinar Baru.
- FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023*. (2023, Maret 29). <https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/origin1904-p.cxm.fifa.com/fifa-removes-indonesia-as-host-of-fifa-u-20-world-cup-2023-tm>
- Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Segera Hentikan Perang Di Gaza*. (2023, Oktober 25). <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5422/berita/indonesia-desak-dewan-keamanan-pbb-segera-hentikan-perang-di-gaza>
- Kemesraan Israel-UEA-Bahrain, Apa Pengaruhnya ke Indonesia?* (2020, September 19). dw.com. <https://www.dw.com/id/kemesraan-israel-uea-bahrain-apa-pengaruhnya-ke-indonesia/a-54978029>
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Normalisasi Hubungan UEA-Bahrain dengan Israel Tak Pengaruhi Sikap Indonesia terhadap Palestina*. (2020, September 18). <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/18/06025111/normalisasi-hubungan-uea-bahrain-dengan-israel-tak-pengaruhi-sikap-indonesia>

- Plano, J. C., & Olton, R. (1969). *The International Relations Dictionary*. Rinehart and Winston.
- Shlaim, A. (1987). Britain and the Arab-Israeli War of 1948. 16(4), 50–76.
<https://doi.org/10.2307/2536720>.
- The Abraham Accords. (2020). *United States Department of State*.
<https://www.state.gov/the-abraham-accords/>
- Wardoyo, B. & Diyauddin. (2023). Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel. LAB 45.
- Wardoyo, B., & Valentino, R. (2022). Breaking Taboo: Explaining the United Arab Emirates' Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel. *Global Strategis*, 16(1), Article 1.
<https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.147-174>
- Wuryandari, G. (Ed.). (2018). *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Pustaka Pelajar.